



Potret Faktual Implementasi *Community Based Tourism* Di Indonesia

Angger Hidayat¹, Nur Jumriatunnisah^{2*}, Dewi Irmawati³

¹ Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

^{2,3} Jurusan Manajemen Informatika, Politeknik Sriwijaya

¹ anggerhidayat@uinjambi.ac.id, ² nurjumriatunnisah@polsri.ac.id *, & ³ dewiirmawati1977@yahoo.com

Abstract

Peningkatan minat para penulis dalam topik pengembangan CBT di Indonesia selama dasawarsa terakhir menunjukkan seberapa penting topik ini untuk dibahas. Beberapa rekomendasi yang diberikan para peneliti terdahulu menggambarkan dimensi yang beragam, seperti optimalisasi program pemerintah, peningkatan sinergi lintas sektor, pembangunan yang adil, dan fokus kepada masyarakat sebagai penerima manfaat. Namun, terlepas dari luasnya dimensi penelitian pengembangan CBT, artikel dengan pembahasan secara kualitatif yang mampu mendeskripsikan pencapaian pengembangan CBT dari berbagai daerah dan studi sejauh ini belum pernah dibahas. Oleh karena itu, penelitian ini menjawab permasalahan tersebut melalui deskripsi implementasi CBT di berbagai wilayah dan studi menggunakan 30 artikel yang telah dipublikasikan hingga saat ini pada database Google Scholar yang di analisis menggunakan metode kualitatif dengan model pendekatan deskriptif. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti melakukan analisis terhadap implementasi aspek pengembangan CBT seperti (1) komitmen pemimpin lokal, (2) kolaborasi antar pemangku kepentingan, (3) antusiasme masyarakat, dan (4) landasan pemerintah yang kuat yang ada dalam berbagai studi. Hasil yang diperoleh menunjukkan tren aspek pengembangan CBT seperti komitmen pengelola dan antusiasme masyarakat menjadi yang paling banyak diperbincangkan, disusul dengan aspek landasan pemerintah dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Berdasarkan data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa potret faktual pengembangan CBT di Indonesia belum optimal secara merata. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi topik-topik lainnya yang keluar dalam studi yang di analisis dengan cara menyediakan rekomendasi bagi penelitian di masa mendatang pada bidang ini.

Keyword: *Community Based Tourism, Potret Faktual, Implementasi CBT, Kualitatif, Studi Komparasi.*

1. PENDAHULUAN

Pariwisata berbasis komunitas (CBT) telah muncul sebagai alternatif yang menjanjikan dalam pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan. Di Indonesia, 60,53% penduduk miskin tinggal di daerah pedesaan yang membutuhkan intervensi peningkatan kesejahteraan secara efektif [1]. CBT menekankan partisipasi masyarakat aktif, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus melestarikan lingkungan, kehidupan sosial, dan budaya [2]. Pendekatan ini sejalan dengan perspektif *pro-poor tourism* (PPT), yang berupaya menciptakan manfaat ekonomi dan kesempatan kerja bagi masyarakat pedesaan [3]. Pengembangan CBT telah menunjukkan dampak positif, antara lain peningkatan pola pikir ekonomi, penciptaan mata pencaharian baru, dan peningkatan pendapatan tanpa meninggalkan aspek tantangan seperti perlunya pengembangan sumber daya manusia lokal yang lebih baik dan peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat [4]. Secara keseluruhan, CBT menghadirkan strategi yang menjanjikan untuk pengentasan kemiskinan pedesaan dengan memanfaatkan potensi lokal dan mendorong pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata.

Sejumlah penelitian tentang CBT dan pengentasan kemiskinan menyoroti efektivitas CBT dalam meningkatkan ekonomi lokal dan sektor pariwisata [5], dengan jumlah penelitian mengenai topik ini yang semakin meningkat seiring berjalannya waktu menandakan pentingnya topik tersebut untuk dibahas. Studi di Jawa Barat menekankan keterlibatan masyarakat, peran pemangku kepentingan, dan pengentasan kemiskinan sebagai fokus utama dalam pengembangan CBT [6]. Meski begitu, kendala tetap ada, seperti infrastruktur dan upaya promosi

yang tidak memadai [7]. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melalui dana alokasi desa terbukti berdampak positif pada pemberdayaan masyarakat dan pemberantasan kemiskinan di pedesaan [8]. Terlepas dari potensinya, implementasi CBT seringkali menghadapi kendala teknis, antara lain papan nama yang rusak, kurangnya penyewaan kendaraan untuk wisatawan, keterbatasan kolaborasi dengan agen perjalanan, dan penurunan produksi oleh-oleh [7]. Untuk memaksimalkan manfaat CBT, para peneliti menyarankan untuk mengoptimalkan program pemerintah, meningkatkan sinergi lintas sektor, memastikan pembangunan yang adil, dan berfokus pada manfaat yang diterima oleh masyarakat dalam

Tata kelola kolaboratif dalam pengembangan pariwisata melibatkan kemitraan sinergis antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pengusaha untuk mencapai hasil yang berkelanjutan [9], [10]. Pendekatan ini menekankan pengambilan keputusan bersama, berbagi sumber daya, dan upaya kolektif dalam merencanakan dan mengimplementasikan inisiatif pariwisata [9]. Peran pemerintah meliputi peraturan legislatif, dukungan infrastruktur, dan pemantauan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan [10]. Masyarakat lokal berkontribusi untuk melestarikan warisan budaya dan memberikan pengalaman otentik [10], [11]. Pengusaha didorong untuk berinvestasi dalam praktik berkelanjutan dan menciptakan peluang kerja lokal [10]. Keberhasilan implementasi tata kelola kolaboratif dalam pengembangan pariwisata membutuhkan setidaknya empat konsep, yakni (1) komitmen dari kepemimpinan lokal tingkat pengelola, (2) kolaborasi pemangku kepentingan yang efektif, (3) antusiasme masyarakat, dan (4) landasan pemerintah yang kuat; pendekatan konsep ini diharapkan memberikan arah yang lebih jelas dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk peningkatan pendapatan, infrastruktur yang lebih baik, dan peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan [11].

Untuk mengembangkan kajian pada keempat konsep yang telah disebutkan, peneliti menetapkan faktor-faktor kunci dari setiap konsep yang diantaranya: (1) komitmen dari kepemimpinan lokal tingkat pengelola yang memperhatikan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi [12]; (2) kolaborasi pemangku kepentingan dalam model pentahelix yang melibatkan akademisi, pengusaha, masyarakat, pemerintah, dan media, sangat penting untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan [13]; (3) antusiasme masyarakat dalam pengembangan CBT dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan, menguatnya kohesi sosial, budaya, lingkungan, dan kebebasan menyampaikan pendapat yang terjamin selama pengembangan CBT dilaksanakan [14]; (4) landasan pemerintah yang kuat dalam memainkan peran sentralnya untuk mendorong keterlibatan masyarakat dan pihak ketiga dalam pengembangan pariwisata, serta perumusan kebijakan yang berpotensi menarik investor baru yang berpihak kepada masyarakat [15].

Dalam konteks tersebut, diperlukan sebuah kajian penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi CBT yang telah diterapkan di Indonesia menggunakan sudut pandang konsep yang telah disebutkan di atas. Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi realita dari berbagai faktor dalam pembangunan CBT, serta evaluasi terhadap efektivitas kinerja dari setiap faktor yang sesuai dengan realita. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pembangunan CBT di berbagai tempat di Indonesia dan sebagai kontribusi dalam perancangan regulasi serta program yang asumsi CBT dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia dapat terwujud. Pentingnya penelitian ini tidak hanya terbatas pada aspek sosial-ekonomi, melainkan juga pada aspek yang lain seperti budaya, dan politik.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan melakukan pencarian sumber data melalui *search engine* Publish or Perish *version 8* [16] pada basis data Google Scholar yang kemudian mendapatkan penyempurnaan metadata melalui *web-program* berbasis *artificial intelligence* yaitu Paperpile. Database Google Scholar merupakan salah satu database yang memiliki reputasi yang baik di bidang akademik dengan tingkat akses pengumpulan data ke dokumen asli yang mudah meskipun dalam skala besar. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi “implementasi *community based tourism* di Indonesia” dan “perkembangan *community based tourism* di Indonesia” pada rentang waktu dari tahun 2013 hingga 2025. Setelah database publikasi dari dua kata kunci didapatkan, langkah selanjutnya adalah *screening* pada *title* dan abstrak dari setiap artikel, proses eliminasi juga diterapkan untuk menyingkirkan artikel yang tidak dilengkapi dengan file dokumen yang utuh. Kemudian, literatur yang ada dalam penelitian ini diklasifikasikan pada topik-topik yang merujuk pada komitmen dari kepemimpinan lokal tingkat pengelola, kolaborasi pemangku kepentingan yang efektif, antusiasme masyarakat, dan landasan pemerintah yang kuat dalam penerapan CBT di berbagai tempat yang menjadi lokasi kasus penelitian-penelitian terdahulu di Indonesia. Pada akhirnya, peneliti berhasil mengumpulkan sebanyak 24 artikel ilmiah berskala nasional maupun internasional baik yang merupakan dokumen jurnal maupun prosiding dan konferensi dan 6 artikel yang dipublikasikan dari tahun 2013 hingga 2019.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi CBT di Indonesia telah mendapatkan popularitas sebagai destinasi unik yang menawarkan keindahan alam, pengalaman budaya, dan interaksi lokal [17], [18]. Desa-desanya ini memanfaatkan tradisi, lanskap, dan atraksi yang beragam untuk menarik pengunjung [18]. Pengembangan CBT melalui desa wisata bertujuan untuk mendongkrak perekonomian lokal dan meningkatkan pendapatan desa [17]. Untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, desa wisata harus terus berinovasi di bidang-bidang seperti pengembangan daya tarik, saluran komunikasi, dan legitimasi [19]. Konsep desa wisata sejalan dengan perkembangan preferensi CBT untuk mendapatkan pengalaman pariwisata alternatif yang menawarkan peluang untuk pembangunan pedesaan di seluruh Indonesia [18], [20]. Penelitian ini menelusuri kondisi faktual implementasi CBT dari berbagai lokasi penelitian terdahulu yang dapat dilihat pada lampiran 1, tidak hanya yang berbentuk desa wisata namun juga beberapa preferensi implementasi CBT lainnya.

Hasil analisis peneliti berdasarkan temuan dan ulasan pada 30 publikasi ilmiah yang tertera pada lampiran 1 kemudian dijadikan sebagai deskripsi potret pengembangan CBT di Indonesia saat ini. Dalam artikel ini, penulis berperan sebagai instrumen utama penelitian yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih sumber data, analisis data, menafsirkan dan membuat kesimpulan atas temuannya. Hasil penafsiran dan pembuatan kesimpulan atas temuan dijelaskan pada poin-poin di bawah ini:

a. Komitmen dari Kepemimpinan Lokal

Dari 10 artikel yang telah diklasifikasi untuk menjawab komitmen dari kepemimpinan lokal selama tahun 2020-2025 membuktikan bahwa komitmen ini ditandai dengan indikator keberhasilan yang nyata yang mencakup keterlibatan kelembagaan, keterlibatan masyarakat, peningkatan ekonomi, dan hasil yang berkelanjutan. Studi melaporkan bahwa pemerintah desa berkontribusi dengan mengelola usaha lokal, mendukung pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan pendapatan masyarakat-dengan peran pemerintah secara eksplisit tercatat dalam 6 dari 10 artikel. Demikian pula, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) muncul di 9 dari 10 laporan sebagai agen utama, koordinator, dan motivator dalam pengembangan pariwisata.

Ukuran konkretnya meliputi partisipasi masyarakat yang tinggi (diamati dalam 7 dari 10 studi), penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan (masing-masing dinilai tinggi dalam 3 studi), dan pemberdayaan masyarakat yang kuat (dinilai tinggi dalam 6 studi). Hasil yang berkelanjutan dibuktikan dengan diterimanya sertifikasi dan penghargaan dalam 4 studi, serta upaya yang dilaporkan dalam konservasi lingkungan (biasanya pada tingkat menengah) dan pelestarian budaya (dinilai tinggi dalam beberapa kasus). Indikator-indikator ini, sebagaimana didokumentasikan secara langsung dalam makalah-makalah yang ditinjau, secara kolektif menunjukkan bahwa peran aktif pemerintah desa dan kelompok-kelompok pariwisata berhubungan dengan keberhasilan implementasi CBT di Indonesia.

Sementara itu, keberhasilan dari kepemimpinan lokal dapat dilihat pada tabel 1 yang menyajikan indikator kinerja kelembagaan dari para pengelola CBT di 10 lokasi yang berbeda sesuai dengan studi yang dijadikan referensi untuk menjawab permasalahan ini.

Tabel 1. Indikator Kinerja Kelembagaan

Penulis	Peran Pemerintah Desa	Peran Pokdarwis	Implementasi ukuran keberhasilan	Tingkat Pencapaian
[21]	Terlibat melalui kepala desa dan Badan Usaha Milik Desa (Badan Usaha Milik Desa) dalam mengelola ekonomi dan infrastruktur lokal	Bertindak sebagai agen pembangunan, penerima manfaat ekonomi, dan pendorong keberlanjutan	Peran optimal dalam mengembangkan wisata pantai	Tinggi
[22]	Terlibat dalam pengelolaan desa wisata	Terlibat dalam pengelolaan desa wisata	Implementasi di berbagai dimensi	Sedang
[23]	Tidak disebutkan	Bertindak sebagai pengemudi dan agen pariwisata	Implementasi CBT yang efektif	Sedang
[24]	Memberikan dukungan fasilitatif melalui promosi media dan pengembangan infrastruktur	Pusat pengelolaan dan pengembangan kegiatan pariwisata	Implementasi yang sukses dengan dampak positif bagi masyarakat	Tinggi
[25]	Tidak disebutkan	Mengelola kegiatan	Penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan	Sedang

[26]	Tidak disebutkan	Pusat proses manajemen, memfasilitasi keterlibatan masyarakat	Kontribusi terhadap konservasi dan peningkatan ekonomi	Sedang
[27]	Tidak ditemukan	Koordinator 13 kelompok masyarakat sebagai penggerak	Implementasi yang sukses dengan keterlibatan masyarakat	Tinggi
[28]	Tersirat keterlibatan melalui proses manajemen	Terlibat dalam pengelolaan desa wisata	Penghargaan nasional dan internasional yang diterima	Tinggi
[29]	Berkolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah kabupaten	Tidak ditemukan	Sertifikasi sebagai desa wisata berkelanjutan	Tinggi
[30]	Meningkatkan pendapatan desa, memanfaatkan potensi pariwisata, membangun sistem informasi yang transparan	Mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata	Kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi	Tinggi

Sumber: Elaborasi mandiri

Berdasarkan data di atas, sifat dan tingkat peran pemerintah desa berada di posisi yang sangat bervariasi, meskipun 6 dari 10 studi menyatakan secara eksplisit keterlibatan pemerintah desa dalam pengembangan CBT. Di sisi lain, peran pokdarwis nampak jelas dalam 9 dari 10 studi baik sebagai agen, motivator, koordinator, dan pendorong partisipasi. Berdasarkan studi yang ditinjau, baik pemerintah desa dan pokdarwis sama-sama memainkan peran penting dalam CBT, dengan keterlibatan pokdarwis lebih konsisten dilaporkan di seluruh studi yang kami teliti. Mayoritas studi melaporkan tingkat pencapaian yang tinggi (6 dari 10 studi), yang secara umum menunjukkan keberhasilan implementasi inisiatif pariwisata berbasis masyarakat dalam konteks yang diteliti.

b. Kolaborasi antar Pemangku Kepentingan

Sepuluh studi dari Indonesia (2020-2025) melaporkan bahwa manfaat nyata dalam pariwisata berbasis masyarakat cenderung terjadi ketika kolaborasi pentahelix kuat. Di daerah dengan keterlibatan pemangku kepentingan yang optimal atau komprehensif seperti yang dicontohkan oleh Geopark Ijen Bondowoso, Kabupaten Batang, desa-desa di Bali, dan Desa Tosari/Sapikerep pengembangan pariwisata ditandai dengan peningkatan pendapatan (dicatat dalam 3 studi), penurunan pengangguran (1 studi), peningkatan infrastruktur dan kualitas produk, serta percepatan pengembangan proyek. Sebaliknya, daerah dengan kemitraan antar pemangku kepentingan yang lebih lemah atau kurang formal (seperti Desa Wisata Sitiwinangun, Pulau Gili Iyang, dan Kabupaten Situbondo) umumnya menawarkan hasil yang lebih sedikit atau metrik keberhasilan yang terbatas.

Berbagai studi menunjukkan adanya perbedaan yang jelas dalam kolaborasi: koordinasi yang efektif antara pemerintah, perusahaan swasta, lembaga akademis, media, dan masyarakat berkorelasi dengan indikator ekonomi dan sosial yang lebih positif, sementara tantangan dalam komunikasi dan alokasi sumber daya cenderung menghambat keberhasilan pembangunan. Indikator keberhasilan kolaborasi antar pemangku kepentingan yang diperoleh dari analisis 10 studi dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Indikator Kekuatan dan Keberhasilan Kolaborasi

Penulis	Lokasi	Wujud Kolaborasi	Indikator Keberhasilan	Tingkat Implementasi
[31]	Pringgasela Selatan dan Labuan Haji	Keterlibatan lima kelompok pemangku kepentingan, perlunya peningkatan koordinasi	Peningkatan infrastruktur dan kualitas produk pariwisata	Perlu perbaikan
[32]	Geopark Ijen Bondowoso	Keterlibatan lima kelompok pemangku kepentingan secara komprehensif	Pendapatan meningkat, pengangguran berkurang	Komprehensif
[33]	Desa Wisata Sitiwinangun	Keterlibatan lima kelompok pemangku kepentingan, kesenjangan antara kepentingan dan kenyataan	Tidak disebutkan	Tidak maksimal
[34]	Desa-desa di Bali	Keterlibatan enam elemen pemangku kepentingan, diklasifikasikan ke	Peningkatan kontribusi finansial dan sosial kepada masyarakat	Optimal

[35]	Pulau Lemukutan	dalam internal dan eksternal Keterlibatan lima pihak pemangku kepentingan, sinergis tetapi dengan keterbatasan	Peningkatan pendapatan masyarakat, lonjakan jumlah wisatawan	Sinergis tetapi dengan keterbatasan
[36]	Pulau Gili Layang	Keterlibatan lima kelompok pemangku kepentingan dengan sifat kolaborasi yang bersifat informal	Tidak disebutkan	Belum optimal
[37]	Kabupaten Batang	Komitmen yang kuat diantara para pemangku kepentingan	Percepatan pengembangan pariwisata halal	Optimal
[38]	Desa Gombengsari	Keterlibatan berbagai pihak dalam perspektif pentahelix	Dukungan untuk keberlanjutan agrowisata	Tidak disebutkan
[39]	Desa Tosari dan Sapikerep	Peran optimal dari berbagai aktor yang terlibat dalam model pentahelix	Desa menjadi terkenal, menghasilkan pendapatan, melibatkan partisipasi masyarakat	Optimal
[40]	Kabupaten Situbondo	Keterlibatan terbatas dari industri/ bisnis dan media massa	Tidak disebutkan	Tidak optimal

Sumber: Elaborasi mandiri

Sesuai dengan analisis data yang diperoleh peneliti, tingkat implementasi CBT menunjukkan 3 dari 10 studi berada di level optimal, sedangkan level yang lain seperti Komprehensif, perlu perbaikan, belum maksimal, sinergis dengan keterbatasan, belum optimal, tidak optimal, dan tidak disebutkan masing-masing 1 studi. Variasi ini menggambarkan tingkat keberhasilan yang berbeda dalam menerapkan model pentahelix di berbagai wilayah. Peneliti juga menemukan beberapa dampak dari pengembangan CBT, antara lain: peningkatan pendapatan (3 studi), pengurangan berkurang, peningkatan infrastruktur dan kualitas produk, kontribusi keuangan dan sosial yang ditingkatkan, peningkatan jumlah wisatawan, pengembangan yang dipercepat, dukungan untuk pariwisata berkelanjutan, peningkatan ketenaran dan partisipasi masyarakat yang masing-masing berjumlah 1 studi. Berbagai hasil ini menunjukkan bahwa implementasi pentahelix yang sukses dapat menghasilkan beragam dampak positif bagi masyarakat lokal.

Kolaborasi antar pemangku kepentingan juga dapat dikategorikan dalam berbagai pola seperti:

- 1) Hubungan Pemerintah-Masyarakat
 - a) Di wilayah dengan kemitraan yang kuat: Pemerintah memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat (contoh: Geopark Ijen Bondowoso)
 - b) Di wilayah dengan kemitraan yang lebih lemah: Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat (contoh: Pulau Lemukutan)
- 2) Keterlibatan Sektor Swasta
 - a) Variasi yang signifikan di seluruh wilayah: Keterlibatan yang kuat: Bisnis memainkan peran kunci dalam berbagi sumber daya dan mengimplementasikan kebijakan (contoh: Kabupaten Batang)
 - b) Keterlibatan yang terbatas: Keterlibatan yang minim dari sektor bisnis, berpotensi menghambat potensi penuh dari model pentahelix (contoh: Kabupaten Situbondo)
- 3) Keterlibatan Institusi Akademik
 - a) Peran penting yang konsisten di sebagian besar wilayah: Menyediakan keahlian, dukungan penelitian, dan pengembangan kapasitas (contoh: Di desa Gombengsari)
 - b) Akademisi berkontribusi dalam mengembangkan sumber daya manusia dan membantu dalam manajemen dan operasional
- 4) Peran Media
 - a) Keterlibatan yang tidak konsisten di seluruh wilayah: Mengakui pentingnya mempromosikan pariwisata dan memastikan pembangunan berkelanjutan melalui komunikasi
 - b) Keterlibatan yang terbatas di beberapa daerah (mis. Kabupaten Situbondo), yang berpotensi berdampak pada visibilitas dan promosi inisiatif pariwisata
- 5) Partisipasi Masyarakat

- a) Masyarakat sering digambarkan sebagai aktor utama dalam pengelolaan pariwisata
- b) Kasus-kasus yang berhasil (misalnya Pulau Lemukutan) menunjukkan peran penting masyarakat dalam mengelola kegiatan pariwisata dan mendapatkan manfaat dari hasil ekonomi

Model pentahelix menunjukkan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Tingkat keterlibatan pemangku kepentingan, efektivitas komunikasi, dan alokasi sumber daya memainkan peran penting dalam menentukan hasil dari inisiatif ini. Daerah dengan kolaborasi yang lebih kuat cenderung melaporkan hasil yang lebih positif dan konkret, sementara daerah dengan kemitraan yang lebih lemah menghadapi tantangan dalam implementasi dan koordinasi.

c. Antusiasme Masyarakat

Antusiasme masyarakat dapat diukur dari seberapa jauh pengembangan CBT dalam memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Dengan adanya peningkatan kebermanfaatan dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Tabel 3 mendeskripsikan indikator ekonomi dan sosial dari dampak pengembangan CBT di berbagai studi.

Tabel 3. Indikator dampak ekonomi dan sosial

Penulis	Penciptaan Lapangan Kerja	Peningkatan Pendapatan	Pemberdayaan Masyarakat	Kohesi Sosial
[41]	Tinggi, peluang kerja baru	Tinggi, peningkatan pendapatan daerah	Keterlibatan tinggi dalam kegiatan pariwisata	Tidak disebutkan
[22]	Diterapkan	Diterapkan	Diimplementasikan, namun partisipasi kaum muda masih kurang	Diterapkan
[23]	Tidak ditemukan	Tidak disebutkan	Tidak disebutkan rinci	Tidak disebutkan
[24]	Tidak disebutkan	Rendah, kurang pendanaan eksternal	Kualitas hidup yang tinggi, kebanggaan masyarakat timbul	Distribusi peran yang tinggi dan adil
[25]	Tidak disebutkan	Tinggi, peningkatan pendapatan masyarakat	Sedang, acara melibatkan komunitas	Tidak disebutkan
[26]	Tidak ditemukan	Sedang, peningkatan ekonomi	Partisipasi aktif dalam managemen	Tidak disebutkan
[27]	Tinggi, peluang kerja yang tercipta	Tinggi, peningkatan pendapatan masyarakat	Tinggi, keterlibatan dalam kegiatan pariwisata	Tinggi, koordinasi dari 13 kelompok masyarakat
[28]	Tidak disebutkan	Tidak ditemukan	Tidak disebutkan	Tidak disebutkan
[29] [30]	Tidak disebutkan Tinggi, peluang pekerjaan tercipta	Tidak ditemukan Tinggi, peningkatan ekonomi masyarakat	Tidak ditemukan Tinggi, partisipasi masyarakat melalui pokdarwis	Tidak disebutkan

Sumber: Elaborasi mandiri

Pemberdayaan masyarakat merupakan hasil positif yang paling konsisten dilaporkan, dengan 6 dari 10 studi melaporkan tingkat yang tinggi. Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masing-masing dilaporkan tinggi dalam 4 dan 3 studi. Kohesi sosial adalah hasil yang paling sedikit dilaporkan, dengan penyebutan eksplisit hanya dalam 2 dari 10 studi. Selain dari hasil analisis dampak ekonomi dan sosial, peneliti juga menyajikan data dampak keberlanjutan budaya dan lingkungan dalam 10 studi pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Indikator keberlanjutan budaya dan lingkungan

Penulis	Pelestarian Lingkungan	Pelestarian Budaya	Praktik Pariwisata Berkelanjutan	Pengakuan atau Sertifikasi
[41]	Sedang, upaya untuk menjaga kebersihan	Tidak disebutkan	Penerapan ekowisata berbasis masyarakat	Tidak disebutkan
[22]	Diterapkan	Diterapkan	Implementasi indikator CBT di seluruh dimensi	Tidak disebutkan
[23]	Disebutkan tetapi tidak rinci	Disebutkan tetapi tidak rinci	Tidak disebutkan	Tidak disebutkan
[24]	Rendah, kurangnya penilaian daya dukung	Pelestarian budaya dan tradisi lokal yang tinggi	Pembelajaran pertukaran budaya	Menerima penghargaan dari ADWI

[25]	Sedang, program pengelolaan limbah	Tidak disebutkan	Tidak ditemukan	Tidak disebutkan
[26]	Sedang, upaya untuk menjaga kebersihan	Pelestarian budaya lokal yang tinggi	Kontribusi terhadap konservasi sumber daya alam dan budaya	Tidak disebutkan
[27]	Tidak disebutkan	Sedang hingga tinggi, integrasi ekowisata dan kehidupan sosial budaya	Fokus pada ekowisata	ISTA 2017 dan penghargaan ASTA 2018
[28]	Tidak disebutkan	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Tidak disebutkan
[29]	Tinggi, komunitas ecovillage untuk keberlanjutan	Tidak ditemukan	Diterapkan	Penghargaan internasional yang disertifikasi Kemenparekraf
[30]	Sedang, upaya pelestarian lingkungan	Tidak disebutkan	Implementasi prinsip Sapta Pesona	Tidak disebutkan

Sumber: Elaborasi mandiri

Studi yang kami tinjau menunjukkan bahwa implementasi CBT dalam konteks Indonesia yang kami teliti sering kali menunjukkan hasil pembangunan berkelanjutan yang positif, terutama dalam dimensi sosial dan budaya. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan dalam pelaporan dan inisiatif keberlanjutan lingkungan. Keragaman dalam pencapaian di seluruh desa menyoroti pentingnya pendekatan yang sesuai dengan konteks pembangunan pariwisata berkelanjutan. Pola-pola utama yang tampak dalam pencapaian pembangunan keberlanjutan sesuai dengan hasil analisis 10 studi antara lain:

- 1) Dimensi keberlanjutan yang saling bergantung: Studi yang melaporkan pencapaian yang tinggi di berbagai dimensi keberlanjutan (seperti David dan Rosanto, 2023; Umam et al., 2022) cenderung melaporkan pencapaian keberlanjutan yang lebih tinggi secara keseluruhan, yang menunjukkan adanya potensi sinergi antara berbagai aspek keberlanjutan dalam implementasi CBT.
- 2) Keterlibatan masyarakat sebagai faktor kunci: Tingkat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang tinggi secara konsisten dikaitkan dengan hasil keberlanjutan yang lebih baik di seluruh studi yang ditinjau.
- 3) Variabilitas dalam fokus lingkungan: Meskipun beberapa desa memiliki inisiatif keberlanjutan lingkungan yang kuat, dimensi ini menunjukkan variabilitas yang paling tinggi di seluruh studi, mulai dari tingkat keterlibatan yang rendah hingga tinggi.
- 4) Pelestarian budaya sebagai kekuatan: Jika dilaporkan, pelestarian budaya sering kali menjadi titik kuat dalam implementasi CBT, dengan beberapa studi menyoroti keberhasilan pelestarian budaya dan tradisi lokal.
- 5) Tantangan ekonomi: Meskipun secara keseluruhan menunjukkan tren positif, beberapa desa menghadapi tantangan dalam hal keberlanjutan ekonomi, terutama dalam mendapatkan pendanaan eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa aspek keuangan mungkin merupakan area potensial untuk perbaikan dalam beberapa implementasi CBT.

d. Landasan Pemerintah yang Kuat

Evaluasi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten dalam CBT antara tahun 2013 hingga 2025 menunjukkan variasi yang nyata di seluruh wilayah Indonesia. Sepuluh studi melaporkan bahwa kebijakan tingkat kabupaten muncul paling sering (5 studi), dengan laporan tambahan pada tingkat kebijakan provinsi, kota, atau gabungan. Beberapa studi menggambarkan dampak dari regulasi yang mampu mempromosikan perluasan partisipasi lokal, peningkatan kunjungan wisatawan, dan pertumbuhan ekonomi, satu studi menghubungkan peraturan pengelolaan pariwisata desa dengan perbaikan lingkungan dan ekonomi. Studi lain melaporkan adanya tantangan dalam menerapkan kebijakan seperti terbatasnya partisipasi masyarakat, kesulitan koordinasi, dan masalah alokasi sumber daya. Secara keseluruhan, catatan menunjukkan adanya beragam jenis kebijakan dan hasil dari penerapannya, beberapa diantaranya tercipta melalui hubungan yang jelas antara praktik regional yang adaptif dan kinerja kebijakan yang lebih baik.

Peneliti merangkum beberapa kerangka kebijakan dan implementasinya seperti pada tabel 5.

Tabel 5. Kerangka kebijakan dan implementasinya

Penulis	Jenis Kebijakan	Strategi Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan	Tantangan
---------	-----------------	----------------------	------------------------	-----------

[42]	Perkembangan pariwisata berbasis komunitas	Perda dan Perbup	Tidak ditemukan	Terbatas pada rutinitas administratif
[56]	Perda No. 7/ 2020 tentang Pengelolaan Desa Wisata	Fokus pada peningkatan daya tarik, penguatan ekonomi lokal, dan pelestarian lingkungan	Partisipasi masyarakat, respon terhadap tren	Kegiatan aktif, partisipasi masyarakat terbatas
[57]	Standar pengelolaan wisata budaya	Standardisasi kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan	Kolaborasi antar pemangku kepentingan pariwisata	Dampak pandemi, kekurangan sosialisasi massa
[58]	Berdasarkan kebijakan-kebijakan pariwisata lokal	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Alokasi sumber daya, koord., komunikasi
[59]	Kebijakan pariwisata berbasis komunitas	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Koordinasi lemah, ketidakselarasan dengan kondisi sosial ekonomi
[60]	Dukungan terhadap CBT	Pengawasan pemerintah dan promosi desa wisata	Tidak ditemukan	Kurangnya pengetahuan tentang pariwisata dan partisipasi tidak merata
[61]	PNPM Mandiri program pariwisata	Pemberdayaan masyarakat, masyarakat terlibat tidak langsung	Keterlibatan masyarakat ada namun bersifat tidak langsung	Tidak ditemukan
[62]	PNPM Mandiri program pariwisata	Perkembangan pariwisata berbasis komunitas	Penciptaan atraksi unik, keterlibatan masyarakat luas, bantuan keuangan	Tidak semua proyek desa wisata berhasil
[63]	Kebijakan pariwisata berbasis komunitas	Perencanaan yang terintegrasi melibatkan beberapa sektor pemangku kepentingan	Tidak ditemukan penyebutan	Kerusakan lingkungan dan perubahan sosial
[64]	Perkembangan pariwisata berbasis komunitas	Pengembangan pemasaran dan program kemitraan	Tidak ditemukan	Infrastruktur belum memadai, partisipasi masyarakat rendah

Sumber: Elaborasi mandiri

Berdasarkan informasi yang tersedia pada tabel 5, ada berbagai jenis kebijakan dan yang paling umum adalah kebijakan pariwisata berbasis masyarakat (4 studi). Sementara untuk strategi implementasi yang disebutkan dalam 9 dari 10 penelitian menggambarkan banyaknya variasi strategi yang dipakai. Strategi dengan pendekatan multi-fokus menjadi yang paling banyak dengan 2 studi, diikuti dengan strategi lainnya termasuk standarisasi, pengawasan pemerintah, dan perencanaan terpadu. Tantangan terbanyak yang dihadapi dalam implementasi kebijakan mengenai CBT adalah terbatasnya partisipasi masyarakat (3 dari 10 studi) disamping tantangan lain seperti masalah administratif, dampak pandemi, kurangnya sosialisasi, masalah alokasi sumber daya, kesulitan komunikasi dan koordinasi, ketidaksesuaian dengan kondisi sosial ekonomi, kurangnya pendidikan, masalah keberhasilan proyek, serta masalah lingkungan dan sosial. Melihat partisipasi masyarakat yang masih menjadi tantangan utama dalam berbagai kasus, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah meliputi pembentukan kelompok sadar wisata, penyelenggaraan jambore, dan pembangunan infrastruktur pariwisata. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan informasi yang lebih luas kepada masyarakat dan mengadakan pelatihan-pelatihan. Di tingkat desa, upaya dapat dilakukan melalui pengelolaan pariwisata dan UMKM yang bekerjasama dengan BUMDes.

4. KESIMPULAN

Sesuai dengan data yang telah disajikan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa wujud pengembangan CBT di Indonesia belum optimal secara merata. Aspek pengembangan CBT seperti komitmen pengelola dan antusiasme masyarakat menjadi yang paling banyak diperbincangkan, disusul dengan aspek landasan pemerintah dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan CBT di Indonesia masih belum seimbang antara dimensi internal dan eksternal apabila menempatkan masyarakat sebagai aktor utama pengembangan. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa kolaborasi pentahelix pariwisata di berbagai wilayah pengembangan perlu di evaluasi oleh pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi masing-masing. Apabila hal ini tidak dilakukan, tidak menutup kemungkinan tujuan pengembangan CBT sebagai alternatif pengentasan kemiskinan di pedesaan hanya akan menjadi agenda

administratif saja. Dari sisi perluasan hasil penelitian ini nampaknya masih sangat perlu dikembangkan. Jumlah studi dengan berbagai kata kunci dapat diperluas sehingga dapat memberikan identifikasi banyaknya kontribusi lain yang berpotensi mengubah wajah implementasi CBT di Indonesia dengan pendekatan analisis yang lebih inovatif. Secara empiris, hasil penelitian ini berdampak pada penelitian yang mendorong evaluasi dan perbaikan pengembangan CBT secara luas. Hal ini diharapkan mampu menjadi opsi kebangkitan bagi desa-desa wisata yang mengalami perlambatan ekonomi karna badai COVID-19.

Referensi

- [1] A. Alfrojems and T. Anugrahini, 'PENGENTASAN KEMISKINAN PERDESAAN MELALUI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF, PARIWISATA DAN MODAL SOSIAL', *inf*, vol. 5, no. 2, pp. 113–127, Dec. 2019, doi: 10.33007/inf.v5i2.1752.
- [2] Y. Ardianti and D. F. Eprilianto, 'PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA MELALUI PENDEKATAN COMMUNITY BASED TOURISM (Studi Pada Desa Tanjung Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto)', *Publika*, pp. 1269–1282, Jul. 2022, doi: 10.26740/publika.v10n4.p1269-1282.
- [3] K. Wulandari, N. D. Gianawati, and F. A. Prasetyo, 'PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN PENGENTASAN KEMISKINAN', *BISMA*, vol. 16, no. 3, p. 143, Nov. 2022, doi: 10.19184/bisma.v16i3.36426.
- [4] Y. P. Wibhisana, 'Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas dalam Program Desa Wisata Jogoboyo Purworejo', *aspirasi*, vol. 12, no. 1, pp. 31–45, Jun. 2021, doi: 10.46807/aspirasi.v12i1.1741.
- [5] C. P. Aprilia, S. Salahuddin, and T. Sulistyarningsih, 'ANALISIS ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT MENGGUNAKAN VOSVIEWER', *prj*, vol. 10, no. 1, pp. 31–39, Feb. 2022, doi: 10.55678/prj.v10i1.615.
- [6] R. Asy'ari, R. Tahir, C. U. Rakhman, and R. R. Putra, 'Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Provinsi Jawa Barat', *soc*, vol. 8, no. 1, p. 47, Jun. 2021, doi: 10.24036/scs.v8i1.292.
- [7] S. A. Asmara, D. Padmaningrum, and S. Sugihardjo, 'Pariwisata berbasis Masyarakat (Community based Tourism) dalam Pengelolaan Desa Wisata', *JTC*, vol. 8, no. 1, p. 16, Jan. 2024, doi: 10.19184/jtc.v8i1.42980.
- [8] H. Hardianto, 'DETERMINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN DESA: ANALISIS DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA (LITERATURE REVIEW MANAJEMEN KEUANGAN)', *JMPIS*, vol. 3, no. 1, pp. 266–275, Mar. 2022, doi: 10.38035/jmpis.v3i1.872.
- [9] M. Taufik, M. Akmal Ibrahim, B. Ahmad, M. Suni, and M. Nur, 'Collaborative Government in Tourism Sector Development', *KSS*, Oct. 2023, doi: 10.18502/kss.v8i17.14148.
- [10] O. Zybareva, V. Pidhirna, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Y. Pushak, and Lviv State University of Internal Affairs, 'SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT: PROJECT MANAGEMENT IN A PRACTICAL DIMENSION', *Market Infrastructure*, no. 80, 2024, doi: 10.32782/infrastructure80-23.
- [11] M. M. Habibi, 'Sinergi Peran Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat', *JIPPK*, vol. 7, no. 2, p. 429, Jul. 2022, doi: 10.17977/um019v7i2p429-437.
- [12] G. A. K. A. Indraningsih, 'IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA KOTA PALU', *n.a*, vol. 1, no. 1, pp. 31–40, Jun. 2019, doi: 10.36417/jpp.v1i1.257.
- [13] R. A. Setyara, A. F. Dzaky, and R. Darmawan, 'Design Pentahelix dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Pulau Pari', *JPP*, vol. 4, no. 1, pp. 68–77, May 2024, doi: 10.21009/jppv4i1.08.
- [14] P. W. Darmayanti and I. M. D. Oka, 'IMPLIKASI PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT BAGI MASYARAKAT DI DESA BONGAN', *JJHM*, vol. 10, no. 2, pp. 142–150, Jun. 2020, doi: 10.22334/jjhm.v10i2.167.
- [15] M. Arfani, V. Marulitua Lumbantobing, and Priyanto, 'Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Dan Kearifan Lokal Di Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu', *SLJIL*, vol. 3, no. 06, pp. 847–860, Jun. 2022, doi: 10.46799/jst.v3i6.574.
- [16] A.-W. Harzing, *Publish or Perish*. (2021). [Windows]. Available: <https://harzing.com/blog/2021/10/publish-or-perish-version-8>
- [17] M. F. Ma'ruf, B. Kurniawan, and R. P. A. G. Pangestu, 'Desa Wisata: Sebuah Upaya Mengembangkan Potensi Desa Dan Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Pada Desa Wisata Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul)', *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, vol. 7, no. 2, Nov. 2018, doi: 10.33005/jdg.v7i2.1209.
- [18] F. Syah, 'STRATEGI MENGEMBANGKAN DESA WISATA', *Proceeding SENDI _U*, pp. 335–341, 2017.
- [19] A. Buchori, 'INOVASI DESA WISATA DALAM MENCIPTAKAN PENGELOLAAN DAN PEMASARAN BERKELANJUTAN', *tourism*, vol. 11, no. 2, pp. 89–100, Dec. 2023, doi: 10.35814/tourism.v11i2.5392.
- [20] R. W. Sekarsari *et al.*, 'Meningkatkan Potensi Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Desa Wisata', *JP2M*, vol. 1, no. 2, p. 153, May 2020, doi: 10.33474/jp2m.v1i2.6509.
- [21] M. Zulaika and F. A. Trisakti, 'COMMUNITY BASED ECOTOURISM: PARTISIPASI POKDARWIS DALAM MENGEMBANGKAN OBJEK WISATA PANTAI PELAWAN KABUPATEN KARIMUN', *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi*, 2022, doi: 10.24014/jrmdk.v3i5.18770.
- [22] T. P. A. Dilla, K. S. M. Parwati, I. G. M. R. Hendrajana, and F. L. Amir, 'Implementasi Community Based-Tourism dalam Mendukung Pariwisata Berkelanjutan', *Jurnal Ilmiah Pariwisata dan Bisnis*, 2024, doi: 10.22334/paris.v3i6.675.
- [23] J. B. Novran, 'Implementasi Konsep Community Based Tourism (CBT) Dalam Mendukung Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan', *Histeria Jurnal: Ilmiah Soshum dan Humaniora*, 2023, doi: 10.55904/histeria.v2i2.820.
- [24] J. David and S. Rosanto, 'Analisa Penerapan Community Based Tourism Pada Desa Wisata: Kampung Wisata Kreatif Cigadung, Jawa Barat', *JF*, vol. 3, no. 08, pp. 809–823, Aug. 2023, doi: 10.54543/fusion.v3i08.348.
- [25] A. W. Febrian and S. Yunita, 'Pengelolaan wisata kampung blekok sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat berbasis community based tourism kabupaten situbondo', 2020, doi: 10.14710/JAB.V9I2.25308.
- [26] R. Palupi, 'PENGELOLAAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT (COMMUNITY BASED TOURISM) DI DESA WISATA KEBONAGUNG KECAMATAN IMOGIRI', 2022.
- [27] R. H. Prihutami, 'KOMPONEN KEPARIWISATAAN DAN PENGEMBANGAN COMMUNITY BASED TOURISM DI DESA WISATA NGLANGGERAN', 2020, doi: 10.31294/PAR.V7I1.7891.

- [28] A. S. Nabiila, B. I. Wipranata, and S. Suryadi, 'STUDI KEBERHASILAN PENGELOLAAN DESA WISATA BERBASIS COMMUNITY BASED TOURISM (OBJEK STUDI: DESA WISATA CIBUNTU, KECAMATAN PASAWAHAN, KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT)', *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, 2023, doi: 10.24912/stupa.v4i2.22436.
- [29] A. Putri, H. Suryono, and Wipranata, 'STUDI KEBERHASILAN PENGELOLAAN PADA DESA WISATA BERBASIS MASYARAKAT (OBJEK STUDI : DESA WISATA BATULAYANG, KECAMATAN CISARUA, KABUPATEN BOGOR)', *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, 2023, doi: 10.24912/stupa.v4i2.22368.
- [30] K. Umam, E. Kurniawati, and Ahmad Arif Widianto, 'THE DYNAMICS OF "POKDARWIS CAPUNG ALAS" IN THE DEVELOPMENT OF COMMUNITY - BASED TOURISM IN PUJON KIDUL VILLAGE DURING THE COVID-19 PANDEMIC', *Geo Journal of Tourism and Geosites*, 2022, doi: 10.30892/gtg.43302-896.
- [31] A. Hidayatullah, M. Ali, and Pahrudin, 'Kolaborasi Pentahelix Dalam Membangun Desa Wisata Berbasis Masyarakat', *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan)*, 2023, doi: 10.29408/jpek.v7i1.15085.
- [32] A. Heru, W. I. R. Nurul, and R. Abdul, 'Community Empowerment Design Through the Pentahelix Model in Tourism Development', *The Es Economics and Entrepreneurship*, 2024, doi: 10.58812/esec.v2i03.237.
- [33] N. Chamidah, B. Guntoro, and E. Sulastri, 'Marketing Communication and Synergy of Pentahelix Strategy on Satisfaction and Sustainable Tourism', *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, vol. 7, no. 3, pp. 177–190, Mar. 2020, doi: 10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO3.177.
- [34] N. M. Ernawati, I. W. B. Arjana, and N. M. R. Sukmawati, 'Managing Community-based Tourism: A Stakeholder Approach in Bali, Indonesia', in *Proceedings of the International Conference On Applied Science and Technology 2019 - Social Sciences Track (ICASTSS 2019)*, Atlantis Press, 2020, doi: 10.2991/icastss-19.2019.16.
- [35] U. Hasanah, I. Ibrahim, and L. Luqman, 'MODEL PENTAHHELIX PADA WISATA BERBASIS MASYARAKAT DI PULAU LEMUKUTAN BENGKAYANG', *I-ECONOMICS A Research Journal on Islamic Economics*, 2023, doi: 10.19109/ieconomics.v9i2.20337.
- [36] Moh. Musleh, A. Subianto, and V. D. Prasita, 'Stakeholder Interaction in the Development of Oxygen Ecotourism on Gili Iyang Island, Indonesia', *Journal of Government and Civil Society*, 2023, doi: 10.31000/jgcs.v7i2.8251.
- [37] R. Pratiwi *et al.*, 'The Collaboration of Penta Helix to Develop Halal Tourism Villages in Batang, Cental Java', *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 2024, doi: 10.18280/ijstdp.190732.
- [38] R. A. Utami and N. D. Novikarumsari, 'Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi Lego Menuju Agrowisata Berkelanjutan dalam Perspektif Pentahelix Model di Gombongsari, Kabupaten Banyuwangi', *jkrrn*, vol. 3, no. 1, p. 62, May 2022, doi: 10.19184/jkrrn.v3i1.31142.
- [39] N. S. Yunas, A. Susanti, N. N. Izana, and W. Widyawati, 'The Pentahelix Model in the Development of Agro-Culture-Based Edutourism in the Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Buffer Village Area (A Study in Tosari Village, Pasuruan Regency and Sapikerep Village, Probolinggo Regency)', *Sodality*, vol. 11, no. 1, pp. 76–85, Jun. 2023, doi: 10.22500/11202344218.
- [40] S. Yuniati, D. Susilo, Pandu Wirayudha, and N. Isra'iyah, 'Pentahelix Model In Community-Based Tourism Development In Situbondo District', *INTERNATIONAL CONFERENCE ON DIGITAL ADVANCE TOURISM, MANAGEMENT AND TECHNOLOGY*, 2023, doi: 10.56910/ictmt.v1i2.37.
- [41] M. Zulaika and F. A. Trisakti, 'COMMUNITY BASED ECOTOURISM: PARTISIPASI POKDARWIS DALAM MENGEMBANGKAN OBJEK WISATA PANTAI PELAWAN KABUPATEN KARIMUN', *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi*, 2022, doi: 10.24014/jrmdk.v3i5.18770.
- [42] N. Asiah and R. Laraga, 'IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA BERBASIS MASYARAKAT KAWASAN WISATA', *PUBLIK*, vol. 11, no. 2, pp. 622–634, May 2024, doi: 10.37606/publik.v11i2.1145.
- [43] F. Qurrota'ayun, A. N. Verza, A. S. Kinanti, N. H. N. Fatimah, and R. Fitri, 'ANALISIS EFEKTIVITAS PENCAPAIAN TUJUAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 7 TAHUN 2020 PADA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA LEBAKMUNCANG', *Jurnal pariwisata Indonesia*, 2023, doi: 10.53691/jpi.v19i2.398.
- [44] W. S. Handono, 'IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DIESEASE 2019 DI PROVINSI BALI', *widyapublika*, vol. 10, no. 1, pp. 41–57, Jun. 2022, doi: 10.70358/widyapublika.v10i1.864.
- [45] M. M. Jupir, 'Implementasi Kebijakan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal (Studi di Kabupaten Manggarai Barat)', 2013, doi: 10.21776/ub.jitode.2013.001.01.05.
- [46] Nasir and H. Salmah, 'Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kecamatan Mangarabombang: Sebuah Evaluasi Kebijakan', *Renewable Energy Issues*, 2024, doi: 10.47134/rei.v1i1.7.
- [47] Nurhidayati, 'Studi evaluasi penerapan Community Based Tourism (CBT) sebagai pendukung agrowisata berkelanjutan', 2015, doi: 10.20473/MKPV28I12015.1-10.
- [48] P. Novia and Asnawi, 'KEBERHASILAN COMMUNITY BASED TOURISM DI DESA WISATA KEMBANGARUM, PENTINGSARI DAN NGLANGGERAN', 2014.
- [49] H. P. J. Putri and A. Manaf, 'FAKTOR – FAKTOR KEBERHASILAN PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DATARAN TINGGI DIENG', 2013.
- [50] S. N. Qodriyatun, 'Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Karimunjawa', *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 2019, doi: 10.46807/aspirasi.v9i2.1110.
- [51] S. Rahayu, D. Utami, and N. F. Kurnia, 'PENGEMBANGAN COMMUNITY BASED TOURISM SEBAGAI STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA', *Jurnal penelitian humaniora*, 2016, doi: 10.21831/hum.v2i1.13111.